



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUGAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NUMOR : G/122/WAS/HK/1991.

### TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENELITIAN DAN MONITORING PENYALURAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TINGKAT II ( PAD II ) TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Juli 1983 Nomor : - 972/2097/PUOD perihal persiapan teknis pengiriman tembusan daftar gaji bulan Agustus dan seterusnya kepada Kantor Perbendaharaan Negara.
  2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 1 Agustus 1983 Nomor : 807-6/6565/SJ perihal Tata penyediaan/penyaluran dana subsidi Daerah Otonom.
  3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Nopember 1983 Nomor 807.6/3890/PUOD, perihal tindak lanjut hasil pertemuan antara Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tanggal 21 September 1983 mengenai pelaksanaan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 1 Agustus 1983 Nomor : 807.6/6565/SJ, Nomor : SE.50/MK/1983.

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran penelitian dan monitoring penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Tingkat I-Lampung dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Tingkat II se- Propinsi Lampung, dipandang perlu membentuk Team Koordinasi yang akan melaksanakan tugas tersebut, yaitu antara Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung dan Biro Keuangan Sekretariat PEMDA Tingkat I Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Darurat Nomor : 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

3. Undang .....

3. Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juli 1983 No. 971/1995/PUOD perihal Petunjuk Penggunaan Dana Gantaran kepada Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan atas pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Team Koordinasi Penelitian dan Monitoring penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Asli Daerah ( PAD ) Tingkat II se = Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 pada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan anggota dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Team Koordinasi membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dalam hal pengawasan terhadap penyaluran gaji para Pegawai Negeri Sipil dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Tingkat II se = Propinsi Lampung.
- Ketiga : a. Team Koordinasi mempunyai tugas :
  - 1) Mengadakan penelitian daftar gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se = Propinsi Lampung.
  - 2) Mengadakan penelitian atas Surat Keterangan Daftar KP.4 Pegawai Negeri Sipil.
  - 3) Mengadakan penelitian atas pemberian tunjangan - ganda bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - 4) Mengadakan penelitian atas pemberian tunjangan - fungsional bagi guru/tenaga para medis.
  - 5) Mengadakan pemeriksaan dan evaluasi atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan pangan Pegawai Negeri Sipil.

6) Penelitian .....

- 6) Penelitian pada punt 1) s/d 5) tersebut diatas dilakukan pada seluruh Dinas/Instansi/Lembaga Non Departemen se - Propinsi Lampung.
- 7) Mengadakan penelitian dan monitoring atas seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Tingkat II - se - Propinsi Lampung.
- b. Membuat Laporan Analise dan Hasil Evaluasi atas hasil - penelitian dan monitoring penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II se - Propinsi Lampung, serta melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dengan tembusan - kepada :
1. Menteri Dalam Negeri CQ. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
  2. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung.
  3. Dinas/Instansi/Satuan kerja yang terkait.
- Keempat : Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Team ditunjuk Staf Pelaksana Team yang anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Kelima : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas-tugas Team dalam rangka penelitian dan monitoring dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Pos Ganjaran, untuk penelitian dan monitoring penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan PAD II - se - Propinsi Lampung.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak 1 April 1991 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL : 8 - 4 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/122/WAS/HK/1991.

TANGGAL : 8 - 4 - 1991.

---

SUSUNAN PELAKSANA PEMERIKSA DAN STAF :

A. PADA INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI LAMPUNG :

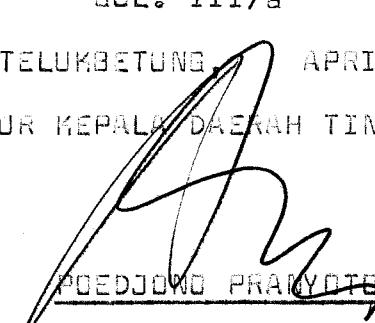
1. YUBRI ALI, BSc GOL. III/b
2. DRG. S U T O Y O GOL. III/a
3. DJUNAIDI. AR GOL. III/a
4. SOFYAN AKHYAR, BA GOL. III/a
5. DRG. M U S I R A N G GOL. III/a
6. DRG. D A R W I N N, GOL. II/d
7. N U R D I N, BA GOL. II/d
8. JIMAN SAPUTRO, BBA GOL. II/c
9. DRG. GATOT SUPARNO GOL. II/c
10. TRI DARMADI GOL. II/c
11. ROBINSON S. NAHOR GOL. II/b
12. SUPRIYANTO GOL. II/a
13. S U K R I GOL. I/c

B. PADA BIRO KEUANGAN SETWILDA TK I LAMPUNG :

1. I WAYAN SUTARJA, SH GOL. III/b
2. DRG. MAHYUDIN GOL. III/b
3. YUDRAN EFFENDI, SE GOL. III/a
4. DRG. SYAIRUN MEGA GOL. III/a
5. FIRDAUS ISMAIL GOL. III/a

TELUKBETUNG APRIL 1991.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

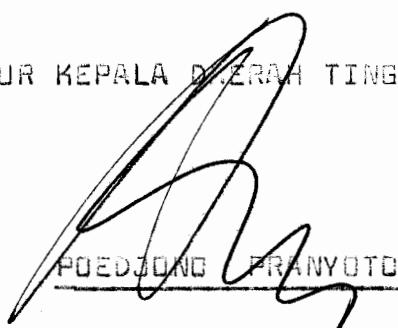
  
POEDJONO PRAMONO

DAFTAR HONORARIUM TEAM PENELITIAN DAN MONITORING  
PENYALURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMAAN PAD  
TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1991/1992

NOMOR	: NAMA DALAM JABATAN	: KEDUDUKAN DALAM JABATAN / TEAM	: BESAR HONOR PER - BULAN
1	2	3	4
1.	: KEPALA INSPEKTURAT WILAYAH PROPINSI LAMPUNG	: KETUA	: Rp.50.000,-
2.	: KEPALA BAGIAN TATA USAHA ITBIL. PROP. LAMPUNG	: WAKIL KETUA	: Rp.45.000,-
3.	: KEPALA BIRO KEUANGAN SETWILDA TK. I LAMPUNG	: SEKRETARIS	: Rp.45.000,-
4.	: IRBAN KEUANGAN PADA ITBIL. PROP. LAMPUNG	: WKL. SEKRETARIS	: Rp.45.000,-
5.	: KABAG PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN TK I LPG	: ANGGOTA	: Rp.40.000,-
6.	: KABAG ANGGARAN BIRO KEUANGAN TK I LAMPUNG	: ANGGOTA	: Rp.40.000,-
7.	: KABAG VERIFIKASI BIRO KEUANGAN TK I LAMPUNG	: ANGGOTA	: Rp.40.000,-
8.	: KABAG PEMBUKAAN BIRO KEUANGAN TK I LAMPUNG	: ANGGOTA	: Rp.40.000,-
9.	: KABAG PEMBINAAN TINGKAT BAWAHAN BIRO KEUANGAN TK I LAMPUNG	: ANGGOTA	: Rp.40.000,-
10.	: Masing-masing pelaksana : PEMERIKSA DAN STAF	: ANGGOTA	: Rp.40.000,-

TELUKBETUNG, 8 - APRIL 1991.-

GUBERNUR KEPALA DILERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO